

Manifestasi Patriotisme Keuangan dalam Peran Auditor Internal Pemerintah: Tinjauan Literatur Sistematis

Ismah Zainunnisa Santika^{1*}, Indrawati Yuhertiana², Gideon Setyo Budiwitjaksono³
^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
25062020005@student.upnjatim.ac.id, yuhertiana@upnjatim.ac.id, gideon.ak@upnjatim.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 25 Mei 2026
Disetujui : 13 Juni 2026
Diterbitkan : 1 October 2026

ABSTRACT

Financial patriotism has emerged as a construct in the political economy literature and is conceptualized as a multilevel financial behavior that aligns personal financial interests with national interests across public authorities, the business sector, and households. Government internal auditors occupy a strategic position in safeguarding public finances through auditing, internal control evaluation, and fraud prevention. However, the literature on financial patriotism and the role of government internal auditors has largely developed in separate academic domains. This systematic literature review aims to map the existing literature in both fields and identify their points of convergence. The review covers 31 articles published between 2021 and 2026, retrieved from four academic databases and supplemented by citation searches on journal publishers' platforms. The literature was examined using content analysis across thematic clusters and bibliometric analysis. The findings reveal three perspectives on the conceptualization of financial patriotism, a shift in the role of internal auditors from watchdogs to trusted advisors, and five conceptual links between the two fields. This study contributes a conceptual framework that bridges financial patriotism and the role of government internal auditors and articulates the manifestation of financial patriotism through three pathways: motivation, practice, and impact.

Keywords: government internal auditors; manifestation; public service motivation; financial patriotism; systematic literature review

PENDAHULUAN

Persoalan pengelolaan keuangan negara di Indonesia masih menjadi tantangan yang Persoalan pengelolaan keuangan negara di Indonesia masih menjadi tantangan nyata. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas pemeriksaan yang dilakukan dalam periode semester II tahun 2025 saja, BPK telah mendapati temuan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebesar Rp18,53 triliun BPK RI (2026). Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia kembali menurun pada tahun 2025 dengan skor 34 Transparency International (2026). Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa risiko penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara telah menjadi fenomena faktual yang perlu dikelola melalui fungsi pengawasan yang efektif. Selain pengawasan ekstern oleh BPK, pengawasan intern dijalankan oleh auditor internal pemerintah sebagai bagian dari arsitektur tata kelola pemerintahan. Kegiatan pengawasan ini meliputi audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan, dengan cakupan yang mencakup tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, serta potensi terjadinya fraud. Pengawasan tersebut ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai dan peringatan dini bagi pimpinan instansi (Republik Indonesia, 2008; AAIP, 2021). Kerangka kelembagaan pengawasan ini menetapkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, mencakup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta

inspektorat, dengan standar kerja yang ditetapkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Namun, meskipun kerangka tersebut telah mapan, independensi auditor di daerah menghadapi tantangan struktural karena kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah, sehingga objektivitas pengawasan dapat tertekan oleh kepentingan pihak yang diawasi Rizki & Turner (2023).

Patriotisme keuangan merupakan konseptualisasi yang relatif baru dalam literatur ekonomi-politik dan dimaknai sebagai bentuk perilaku finansial yang menyelaraskan kepentingan ekonomi pribadi dengan kepentingan negara (Krysovatty et al., 2025). Konsep tersebut mengusulkan tiga level aktor patriotisme keuangan, yaitu otoritas publik, sektor bisnis, dan rumah tangga. Sementara itu, Nadirsyah et al. (2024) dan Suprpto & Agustia (2023) menunjukkan bahwa auditor internal pemerintah memegang peran dalam pengamanan keuangan dan aset negara melalui fungsi audit, evaluasi pengendalian internal, serta pencegahan *fraud*. Kedua bidang berkembang dalam silo akademik yang terpisah, padahal posisi auditor internal pemerintah secara fungsional dekat dengan operasionalisasi patriotisme keuangan di level aparatur negara. Pemetaan sistematis terhadap kedua bidang menjadi penting untuk mengidentifikasi titik temu konseptual antara keduanya.

Kajian terdahulu menggambarkan dinamika kedua bidang secara terpisah. Krysovatty et al. (2025) membangun substansiasi teoretis patriotisme keuangan dengan memposisikan otoritas publik sebagai aktor yang menjalankan kebijakan fiskal yang menyelaraskan kepentingan negara dan pembayar pajak, namun analisisnya tidak mengelaborasi peran spesifik aparatur teknis seperti auditor internal pemerintah. Hue et al. (2025) menguji motivasi pelayanan publik (*Public Service Motivation/PSM*) di Vietnam dengan pendekatan *Q-methodology* dan menemukan bahwa patriotisme aktivistik dan patriotisme egois merupakan dua dari empat dimensi inti PSM di sektor publik, sehingga patriotisme dapat dipandang melekat pada motivasi aparatur. Rihaney et al. (2024) menunjukkan bahwa motivasi auditor merupakan determinan signifikan kualitas audit pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sumatera Utara, sejajar dengan determinan independensi dan kompetensi. Suprpto & Agustia (2023) menempatkan auditor internal pemerintah sebagai variabel moderasi dalam pencegahan *fraudulent financial statements* pada pemerintah daerah, sehingga peran auditor internal pemerintah tidak hanya bersifat teknis melainkan substantif dalam menjaga integritas fiskal. Nadirsyah et al. (2024) menegaskan peran kunci internal audit dalam tata kelola sektor publik dan pencegahan *fraud*.

Telaah kritis terhadap kajian-kajian tersebut menunjukkan adanya celah yang belum terjawab. Literatur patriotisme keuangan belum membahas peran spesifik auditor internal pemerintah sebagai aktor patriotisme keuangan, sedangkan literatur auditor internal pemerintah belum membongkar akar nilai (*values*) yang memotivasi auditor, termasuk dimensi patriotisme. Akibatnya, dua bidang yang secara fungsional saling berdekatan di tataran kebijakan publik justru belum pernah disandingkan dalam kerangka konseptual yang utuh.

Penelitian ini bertujuan memetakan literatur terdahulu pada dua bidang tersebut serta mengidentifikasi titik temu konseptual antara keduanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan dua pertanyaan riset. RQ1: Bagaimana literatur saat ini memetakan patriotisme keuangan dan peran auditor internal pemerintah? RQ2: Bagaimana patriotisme keuangan termanifestasi dalam peran auditor internal pemerintah? Kontribusi penelitian bersifat teoretis. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang menjembatani patriotisme keuangan dan peran auditor internal pemerintah, dua bidang yang selama ini berkembang terpisah dalam literatur, serta mengartikulasikan jalur manifestasi patriotisme keuangan dalam peran auditor internal pemerintah pada konteks Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat di Indonesia.

STUDI LITERATUR

Landasan Teori

Tinjauan ini berpijak pada teori motivasi pelayanan publik (*Public Service Motivation*) sebagai landasan teori utama. J. L. Perry & Wise (1990) memposisikan motivasi pelayanan publik sebagai orientasi motivasional khas aparatur publik, dengan dimensi klasik berupa ketertarikan pada kebijakan publik, komitmen pada nilai publik, rasa iba, dan pengorbanan diri (J. Perry, 1996).

Teori ini menjadi pengikat konseptual dua bidang yang dikaji. Hue et al. (2025) memperluas dimensi motivasi pelayanan publik dengan memasukkan *activistic patriotism* dan *egoistic patriotism* sebagai dua dari empat dimensi inti pada aparatur sektor publik. Perluasan tersebut memungkinkan patriotisme keuangan dibaca sebagai dimensi nilai yang melekat pada motivasi aparatur, termasuk auditor internal pemerintah.

Landasan kedua adalah teori *stewardship*. Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997) memposisikan pengelola sebagai *steward* yang mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi, berbeda dengan asumsi pemaksimalan kepentingan diri pada teori keagenan. Dalam konteks keuangan negara, auditor internal pemerintah yang menjunjung patriotisme keuangan dapat dipahami sebagai *steward* sumber daya publik, sehingga teori ini melengkapi motivasi pelayanan publik dalam menjelaskan kesediaan auditor menjaga integritas fiskal.

Pada klaster empirik peran auditor, teori atribusi dipakai oleh beberapa studi sebagai kerangka penjas (Fauzi et al., 2024; Hwee & Nasution, 2024; Usman et al., 2023). Teori ini, menempatkan perilaku auditor sebagai hasil atribusi internal, seperti nilai dan motivasi, serta atribusi eksternal, seperti tekanan struktural (Heider, 1983; Robbins & Judge, 2013). Patriotisme keuangan dalam kerangka ini menempati posisi atribusi internal yang dapat menggerakkan independensi dan kualitas audit. Ketiga teori tersebut menempatkan nilai internal aparatur sebagai penggerak perilaku, dan menjadi lensa untuk menafsirkan titik temu antara patriotisme keuangan dan peran auditor internal pemerintah pada bagian sintesis.

Patriotisme: Definisi dan Dimensi

MuBotter (2024) merumuskan patriotisme secara sempit sebagai rasa cinta terhadap negara dan kewajiban untuk tetap loyal terhadap tanah air, yang dibedakan dari patriotisme demokratis yang berpusat pada nilai-nilai demokrasi. Rumusan tersebut divalidasi melalui model tiga-faktor pada sampel representatif Jerman dan Denmark. Bitschnau & MuBotter (2024) menegaskan bahwa konsep patriotisme memuat banyak varian, antara lain patriotisme konstruktif, patriotisme buta, patriotisme *civic*, dan patriotisme etis, sehingga konseptualisasinya rentan terhadap kekaburan apabila domain dan dimensinya tidak ditegaskan secara eksplisit dalam analisis empirik. Hue et al. (2025) mengidentifikasi patriotisme sebagai salah satu dimensi inti motivasi pelayanan publik di Vietnam. Melalui pendekatan *Q-methodology* terhadap tenaga akademik di lima perguruan tinggi negeri, Hue et al. (2025) menemukan dua dari empat dimensi yang dikategorikan sebagai patriotisme aktivistik (*activistic patriotism*) dan patriotisme egois (*egoistic patriotism*). Patriotisme aktivistik tercermin pada kesediaan menempuh upaya besar demi memenuhi kewajiban terhadap negara, sedangkan patriotisme egois berakar pada kesadaran moral mengenai kesejahteraan bersama.

Nasionalisme: Konsep dan Tipologi

Piwoni dan MuBotter (2023) memetakan tipologi nasionalisme melalui perbedaan *civic-ethnic*, yaitu nasionalisme *civic* yang berbasis kewargaan inklusif berhadapan dengan nasionalisme *ethnic* yang berbasis kebangsaan eksklusif. Tipologi tersebut diperlakukan sebagai tipe ideal yang dapat dimiliki secara simultan oleh warga negara, bukan sebagai kategori yang saling meniadakan (Piwoni dan MuBotter, 2023). Pada tataran pengukuran, MuBotter (2022) menguji tiga model dominan untuk mengoperasionalkan nasionalisme menggunakan data ISSP 2003 Jerman. Hasilnya mengungkap ketidaksesuaian konseptual karena indikator kebanggaan (*pride*) digunakan secara tidak konsisten untuk mengoperasionalkan nasionalisme maupun patriotisme tanpa justifikasi yang memadai MuBotter (2022). Huang et al. (2023) memberikan bukti empirik dari konteks Tiongkok dengan menganalisis sekitar 20 juta unggahan *Sina Weibo* periode 2012-2017 dan menemukan bahwa nasionalisme tumbuh paralel dengan patriotisme di ruang siber, namun keduanya berkorelasi lemah sehingga digerakkan oleh dinamika kapasitas negara yang berbeda. Variasi tipologi dan konteks tersebut menegaskan bahwa nasionalisme tidak dapat diperlakukan sebagai konsep monolitik.

Perbedaan Patriotisme dan Nasionalisme

Bitschnau & Mußotter (2024) memetakan dikotomi klasik antara patriotisme dan nasionalisme yang dominan dalam literatur, yaitu patriotisme sebagai sikap positif yang berbasis cinta terhadap tanah air sekaligus selaras dengan nilai-nilai demokrasi, sementara nasionalisme dipandang sebagai sikap eksklusif yang menonjolkan superioritas bangsa. Perbedaan tersebut dikritisi oleh Bitschnau & Mußotter (2024) karena bersifat kabur secara konseptual dan tidak konsisten secara empirik. *Framing* "patriotisme baik dan nasionalisme buruk" memberikan legitimasi normatif yang berlebihan kepada gagasan patriotisme *civic* dan meminggirkan perspektif kritis Bitschnau & Mußotter (2024). Piwoni & Mußotter (2023) menjembatani perdebatan tersebut melalui telaah ulang perbedaan *civic-ethnic* dan merekomendasikan agar patriotisme dan nasionalisme diperlakukan sebagai tipe ideal yang dapat dimiliki secara simultan oleh warga negara, bukan sebagai kategori yang saling meniadakan. Mußotter (2024) memperkaya perdebatan dengan model tiga-faktor yang membedakan nasionalisme yang berfokus pada bangsa, patriotisme yang berfokus pada tanah air, dan patriotisme demokratis yang berfokus pada nilai-nilai demokrasi. Model tersebut divalidasi pada sampel representatif Jerman dan Denmark dengan kecocokan yang lebih baik dibandingkan model dua-faktor konvensional (Mußotter, 2024). Ketiga lensa tersebut menegaskan bahwa perbedaan patriotisme dan nasionalisme harus dilakukan secara cermat ketika konsep diaplikasikan pada domain spesifik seperti perilaku finansial, agar tidak terjadi konflasi konsep yang dapat mengaburkan implikasi kebijakan dan implikasi keagenan.

Pergeseran Konseptual: dari Nasionalisme Keuangan ke Patriotisme Keuangan

Pergeseran konseptual dari nasionalisme keuangan ke patriotisme keuangan mencerminkan perluasan ranah aktor yang terlibat dalam kebijakan dan praktik keuangan negara. Johnson & Barnes (2025) memposisikan nasionalisme keuangan kontemporer sebagai pandangan dunia yang berakar pada motivasi nasionalis, berfokus pada kebijakan keuangan, dan iliberal dalam konsepsi ekonomi politiknya. Empat tipologi nasionalisme keuangan yang dirumuskan Johnson & Barnes (2025), yaitu *internal insulating*, *internal revisionist*, *external insulating*, dan *external revisionist*, seluruhnya berorientasi *top-down* dan menempatkan negara sebagai aktor utama yang memanfaatkan instrumen keuangan untuk agenda nasionalis.

Hoeffler (2023) mempersempit fokus dengan memperkenalkan patriotisme ekonomi sebagai proyek politik aktor patriotik untuk membuat ruang politik-ekonomi mereka lebih sedikit bergantung pada pihak luar. Berbeda dari nasionalisme keuangan yang dikotomik, patriotisme ekonomi mengakui keberadaan instrumen liberal dan protektionis yang dirancang oleh *policymakers*, dengan tujuan harmonisasi kepentingan negara dan pelaku ekonomi. Studi kasus instrumen kebijakan persenjataan Uni Eropa, yaitu *Defence Procurement Directive* 2009 dan *European Defence Fund* 2021, menunjukkan bahwa patriotisme ekonomi dapat berkembang pada level supra-nasional yang melibatkan kompromi antar aktor publik (Hoeffler, 2023).

Krysovatty et al. (2025) menyempurnakan pergeseran tersebut dengan merumuskan patriotisme keuangan sebagai jenis perilaku keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi pribadi dengan kepentingan sosial. Tiga level pelaku patriotisme keuangan diidentifikasi, yaitu otoritas publik, sektor bisnis, dan rumah tangga. Pergeseran konseptual ini menggeser pusat gravitasi dari negara sebagai aktor tunggal ke konstelasi multilevel di mana aparat publik dan warga negara turut menjadi agen aktif patriotisme keuangan, sehingga membuka ruang teoretis untuk memetakan peran auditor internal pemerintah sebagai bagian dari aparat publik dalam manifestasi mikro patriotisme keuangan.

Patriotisme Keuangan dalam Konteks Empirik

Studi empirik patriotisme keuangan secara konsisten memodelkan patriotisme afektif sebagai antededen kepatuhan pajak dan perilaku fiskal warga, dengan dominasi konteks UMKM dan wajib pajak orang pribadi di Asia. Alshira'h et al. (2021) menguji pengaruh patriotisme dan tata kelola publik pada kepatuhan pajak penjualan UKM manufaktur Yordania dan menemukan bahwa patriotisme tidak hanya berpengaruh langsung positif terhadap kepatuhan, melainkan juga memoderasi hubungan antara tata kelola publik dan kepatuhan dengan memperkuat efeknya.

Patriotisme dioperasionalkan sebagai keterikatan afektif berupa cinta tanah air dan kecenderungan menghindari aktivitas *fraud* pajak (Alshira'h et al., 2021)

Studi di Indonesia juga memperluas bukti tersebut. Kristiana et al. (2025) menemukan patriotisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sari et al. (2025) memodelkan patriotisme sebagai moderator yang memperkuat hubungan antara sikap kewirausahaan dan kepatuhan pelaporan keuangan. Nurhayati et al. (2025) membuktikan bahwa kebanggaan nasional berpengaruh signifikan terhadap perilaku patuh pajak meski tidak signifikan terhadap niat patuh pajak. Nastiti et al. (2025) memetakan patriotisme pelaku UMKM sebagai dimensi yang mencakup kebanggaan, kesediaan berkorban, pengabdian terhadap negara, dan kesediaan berdonasi untuk kepentingan publik. Studi-studi tersebut memberikan pandangan terkait patriotisme di tengah literatur kepatuhan pajak Indonesia yang umumnya tetap berfokus pada faktor administratif-struktural seperti sistem e-filing, sosialisasi, dan sanksi pajak (Safira & Yuhertiana, 2023)

Pola lintas studi tersebut menunjukkan bahwa patriotisme keuangan telah mapan sebagai konstruk anteseden kepatuhan fiskal pada sisi pembayar pajak, namun seluruh studi memperlakukan otoritas publik dan auditor sebagai latar regulasi tanpa menelisik kontribusi langsung aparat pengawas terhadap manifestasi atas patriotisme keuangan tersebut. Celah ini menjadi titik awal penelitian untuk memetakan peran auditor internal pemerintah sebagai aktor patriotisme keuangan.

Peran Auditor Internal Pemerintah

Tipologi peran auditor internal pemerintah berkembang dari *watchdog* tradisional ke *trusted advisor* dan *value-adder*. Liston-Heyes & Juillet (2024) menempatkan auditor sektor publik sebagai *assurance provider* yang nilainya bergantung pada kemampuan *review* objektif dan profesional atas aktivitas pemerintah. Calvin et al. (2026) memetakan pergeseran peran auditor internal dari "*function to find faults*" ke *management support function* yang menjalankan *review* independen dan objektif, dengan *trusted advisor* sebagai evolusi dari *assurance role* yang menambah tugas konsultasi dan *advisory*. Pergeseran serupa diamati oleh Volodina et al. (2023) di pemerintah pusat Ukraina, di mana auditor terjepit antara peran tradisional *watchdog* yang diharapkan oleh manajer institusi dan peran baru *performance auditor* yang diharapkan oleh Kementerian Keuangan. Pada konteks Indonesia, Sutaryo et al. (2022) menunjukkan bahwa kematangan fungsi audit internal pemerintah daerah merupakan kontributor terkuat terhadap kualitas pelayanan publik, dengan auditor internal pemerintah berperan sebagai mekanisme pengawasan dalam relasi keagenan antara publik dan pemerintah daerah. Tipologi peran tersebut secara operasional diterjemahkan melalui kerangka SPIP (PP 60/2008) yang menempatkan APIP, BPKP, dan Inspektorat sebagai aktor pengawasan internal pemerintah.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*/SLR) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Protokol pelaksanaan SLR mengikuti panduan PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Pendekatan SLR dipilih agar pemetaan literatur mengenai patriotisme keuangan dan peran auditor internal pemerintah dapat dilakukan secara komprehensif, transparan, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pencarian literatur dilakukan pada empat basis data publikasi akademik, yaitu Scopus, Crossref, Taylor & Francis, dan ProQuest. Penelusuran pada Scopus dan Crossref dilakukan menggunakan aplikasi *Publish or Perish*, sedangkan penelusuran pada Taylor & Francis dan ProQuest dilakukan langsung melalui laman situs. Periode publikasi dibatasi pada rentang tahun 2021 sampai dengan 2026, dan bahasa publikasi dibatasi pada Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pencarian menggunakan rangkaian kata kunci yang dikelompokkan ke dalam tiga klaster konseptual. Klaster pertama mencakup terminologi patriotisme keuangan beserta variannya. Klaster kedua mencakup peran auditor internal pemerintah. Klaster ketiga merupakan jembatan

konseptual berbasis motivasi pelayanan public (*Public Service Motivation*). Pencarian tambahan dilakukan melalui penelusuran sitasi pada laman referensi artikel relevan dan laman sitasi pada situs penerbit jurnal seperti SpringerNature dan Wiley. Penelusuran tambahan tersebut menghasilkan 9 artikel *eligible* dari jurnal terindeks Scopus dan Sinta 2.

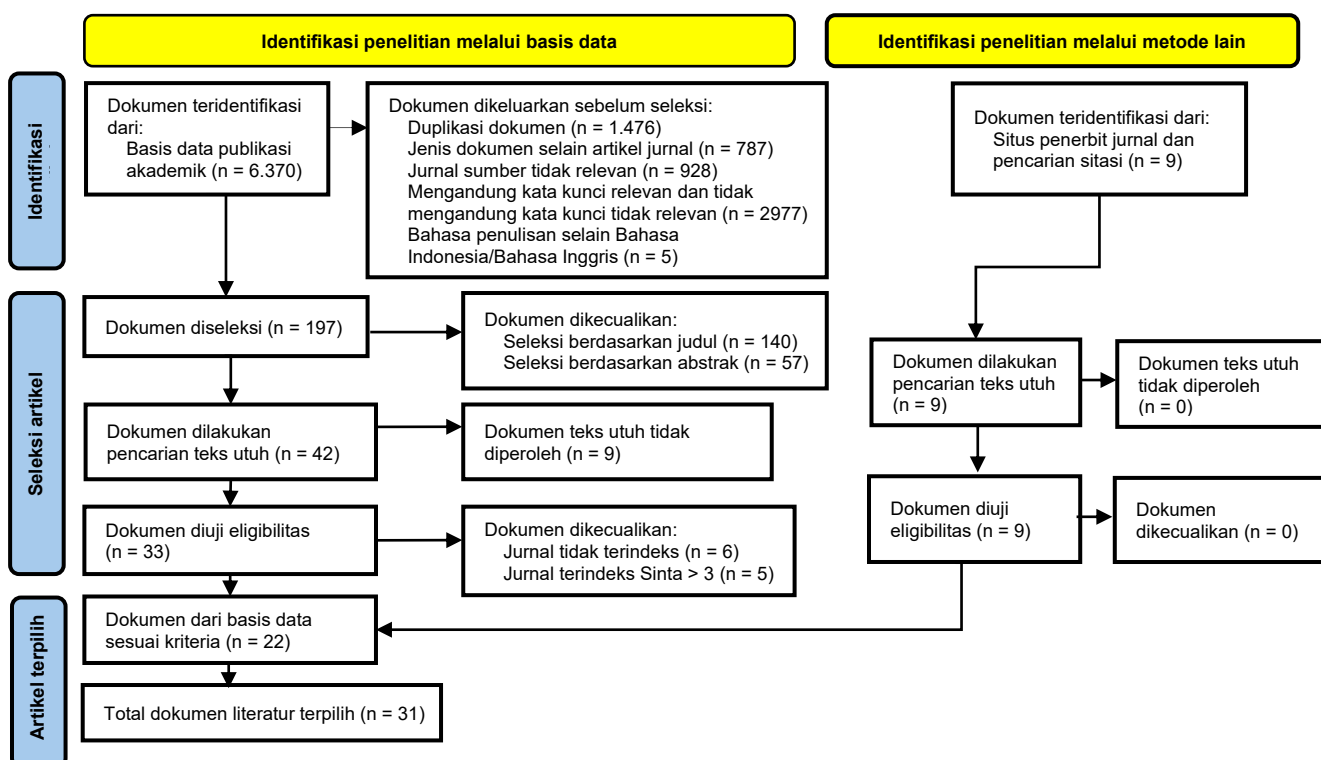
Teknik Seleksi Artikel

Kriteria seleksi artikel disusun untuk memastikan tiga hal, yaitu keterkaitan substantif dengan topik penelitian, kualitas publikasi yang memadai, dan aksesibilitas data untuk dianalisis.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Aspek	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Relevansi topik	Mengandung kata kunci patriotisme keuangan dan/atau peran auditor internal pemerintah	Tidak mengandung kata kunci relevan, atau mengandung kata kunci tidak relevan dengan topik
Periode publikasi	Tahun 2021 - 2026	Sebelum tahun 2021
Bahasa publikasi	Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris	Bahasa selain Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris
Jenis publikasi	Artikel jurnal yang melalui proses telaah sejawat (<i>peer-reviewed</i>)	Prosiding, tesis, disertasi, buku, laporan, dan dokumen non-jurnal lainnya
Sumber jurnal	Jurnal terindeks Scopus atau SINTA peringkat 1 sampai dengan 3	Jurnal tidak terindeks, atau terindeks SINTA peringkat di atas 3
Aksesibilitas	Naskah lengkap (<i>full-text</i>) dapat diperoleh	Naskah lengkap tidak dapat diperoleh

Proses seleksi divisualisasikan pada Gambar 1 yang mengikuti format PRISMA 2020. Dari total 6.370 dokumen dari basis data dan 9 dokumen tambahan, didapatkan 31 artikel literatur final.



Penilaian Kualitas Studi

Untuk mengurangi risiko bias seleksi, setiap artikel yang lolos kriteria eligibilitas dinilai kualitasnya menggunakan *Quality Checklist* yang diadaptasi dari Kitchenham (2004). *Quality Checklist* mencakup lima butir, yaitu kejelasan tujuan penelitian, kesesuaian desain metode, kejelasan prosedur pengumpulan dan analisis data, kejelasan temuan beserta dukungan datanya, serta relevansi terhadap topik tinjauan. Setiap butir diberi skor 1 untuk terpenuhi, 0,5 untuk terpenuhi sebagian, dan 0 untuk tidak terpenuhi, dengan skor maksimal 5. Artikel dengan skor minimal 3 dipertahankan. Seluruh 31 artikel final memperoleh skor di atas ambang batas tersebut. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada teks utuh dokumen artikel.

Teknik Analisis Artikel

Analisis terhadap 31 artikel final dilakukan dalam dua tahap yang saling melengkapi. Tahap pertama adalah analisis konten pada kluster literatur untuk mengidentifikasi konsep, definisi, dimensi, metode, dan temuan kunci pada setiap artikel. Tahap kedua adalah analisis bibliometrik serta pemanfaatan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan *co-occurrence* kata kunci di seluruh literatur, sehingga titik temu antara dua bidang utama dapat diidentifikasi secara visual.

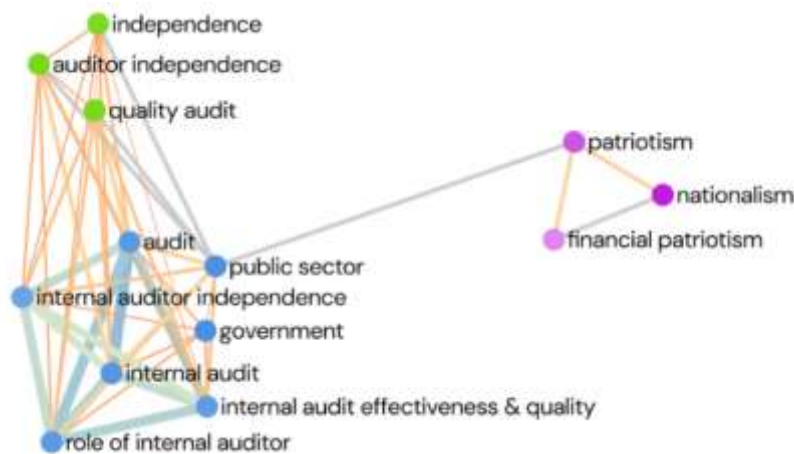
HASIL

Tinjauan literatur sistematis ini menghasilkan literatur final sebanyak 31 artikel yang dipublikasikan pada tahun 2021 - 2026. Karakteristik bibliometrik literatur ditelaah atas tiga karakteristik, yaitu metode penelitian serta peringkat indeks jurnal penerbit sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Bibliometrik

Karakteristik	Kategori	Jumlah Artikel	Persentase
Metode Penelitian	Kuantitatif	21	67,74%
	Mixed Methods	4	12,90%
	Konseptual	3	9,68%
	Kualitatif	3	9,68%
Peringkat Indeks Jurnal Penerbit	Scopus Q1	12	38,71%
	Scopus Q2	7	22,58%
	Scopus Q3	5	16,13%
	Scopus Q4	3	9,68%
	Sinta 2	4	12,90%

Pemetaan *co-occurrence network* kata kunci di seluruh literatur dianalisis menggunakan VOSviewer untuk menghasilkan *network map* yang kemudian diimpor ke *platform* Gephi untuk meningkatkan visibilitas *nodes* kata kunci sebagaimana tersaji pada Gambar 6.



Gambar 6. Co-occurrence Network Kata Kunci Literatur

Visualisasi tersebut memperlihatkan tiga kluster kata kunci yang relatif terpisah, yaitu kluster *Internal Audit*, kluster *Auditor Quality*, dan kluster *Patriotism*, dengan sambungan melalui kata kunci *Public Sector* berdasarkan artikel Hue et al. (2025).

Pemetaan untuk menjawab pertanyaan riset pertama (RQ1) dilakukan melalui dua sumbu, yaitu definisi dan dimensi patriotisme keuangan dalam 8 artikel terkait Patriotisme Keuangan (Tabel 3) dan tipologi peran auditor internal pemerintah dalam 17 artikel terkait Internal Audit Sektor Publik dan Peran Internal Auditor Pemerintah (Tabel 4). Tabel 3 menyajikan ringkasan istilah utama, definisi inti, dan aspek konseptual patriotisme keuangan per artikel.

Tabel 3. Definisi dan Dimensi Patriotisme Keuangan per Artikel

No	Artikel	Istilah Utama	Definisi Inti
1	Krysovatty et al. (2025)	<i>financial patriotism</i>	Patriotisme keuangan adalah perilaku keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi pribadi dengan kepentingan sosial-negara, dan terwujud pada tiga level aktor yaitu otoritas publik, sektor bisnis, dan rumah tangga
2	Kristiana et al. (2025)	<i>patriotism</i>	Patriotisme adalah identifikasi dan keterikatan afektif terhadap negara berupa cinta dan kebanggaan, yang mendorong wajib pajak meyakini pembayaran pajak sebagai kontribusi nyata pada pembangunan nasional
3	Johnson & Barnes (2025)	<i>financial nationalism</i>	Nasionalisme keuangan kontemporer adalah pandangan dunia yang bermotif nasionalis dalam aksi politik, berfokus pada kebijakan keuangan, dan iliberal dalam konsepsi ekonomi politiknya
4	Sari et al. (2025)	<i>patriotism</i>	Patriotisme adalah perasaan cinta dan tanggung jawab terhadap negara yang dalam kerangka kebijakan sipil mencerminkan motivasi intrinsik untuk berkontribusi pada kemajuan negara, termasuk melalui kepatuhan fiskal
5	Nurhayati et al. (2025)	<i>patriotism</i>	Kebanggaan nasional adalah kebanggaan atau cinta terhadap negara seseorang yang berperan kunci dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dorongan pembayaran pajak yang lebih tinggi

No	Artikel	Istilah Utama	Definisi Inti
6	Nastiti et al. (2025)	<i>patriotism</i>	Patriotisme dalam konteks kepatuhan pajak adalah rasa bangga, kesediaan berkorban, dan pengabdian terhadap negara yang dilengkapi dengan cinta dan keterikatan emosional pada negara
7	Hoeffler (2023)	<i>economic patriotism</i>	Patriotisme ekonomi adalah proyek politik di mana aktor patriotik berupaya membuat ruang politik-ekonomi mereka lebih sedikit bergantung pada pihak luar agar memperoleh kendali yang lebih besar
8	Alshira'h et al. (2021)	<i>patriotism</i>	Patriotisme pemilik atau manajer UKM adalah keterikatan afektif berupa perasaan dan identifikasi positif terhadap tanah air, yang tercermin dalam kecenderungan membayar pajak penjualan lebih banyak serta menghindari aktivitas <i>fraud</i>

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa istilah utama patriotisme keuangan terbagi atas tiga kategori, yaitu konsep formal patriotisme keuangan (Krysovatty et al., 2025), patriotisme dalam konteks kepatuhan pajak warga atau pelaku UMKM, serta variasi konseptual *financial nationalism* dan *economic patriotism* (Hoeffler, 2023; Johnson & Barnes, 2025). Hanya dua artikel, yaitu Krysovatty et al. (2025) dan Hoeffler (2023) yang menempatkan otoritas publik atau aparaturnya sebagai aktor patriotisme keuangan, sementara enam artikel lainnya berfokus pada warga atau pelaku usaha sebagai aktor.

Tabel 4 menyajikan ringkasan tipologi peran, determinan kinerja, dan kaitan dengan patriotisme pada 17 artikel auditor internal pemerintah dan auditor sektor publik.

Tabel 4. Tipologi Peran Auditor Internal Pemerintah per Artikel

No	Artikel	Peran Auditor	Determinan Kinerja	Kaitan dengan Patriotisme
1	Liston-Heyes & Juillet (2024)	<i>watchdog, assurance provider</i>	<i>independence</i>	Tidak
2	Fauzi et al. (2024)	<i>assurance provider</i>	<i>independence, professionalism, skepticism, organizational culture</i>	Tidak
3	Rihaney et al. (2024)	<i>watchdog, compliance enforcer, fraud preventer</i>	<i>competence, independence, motivation</i>	Tidak
4	Hwee & Nasution (2024)	<i>watchdog, fraud preventer, assurance provider</i>	<i>independence, competence, motivation</i>	Tidak
5	Rizki & Turner (2023)	<i>assurance provider, watchdog</i>	<i>independence, professionalism, ethics</i>	Implisit
6	Samagaio & Felício (2023)	<i>assurance provider, risk advisor, fraud preventer, compliance enforcer</i>	<i>independence, motivation, organizational culture, competence</i>	Tidak

No	Artikel	Peran Auditor	Determinan Kinerja	Kaitan dengan Patriotisme
7	Usman et al. (2023)	<i>assurance provider, compliance enforcer</i>	<i>independence, ethics, professionalism</i>	Tidak
8	Calvin et al. (2026)	<i>trusted advisor, consultant, watchdog, value adder, assurance provider</i>	<i>competence, organizational culture</i>	Tidak
9	Lubis et al. (2024)	<i>watchdog, fraud preventer, assurance provider</i>	<i>internal control, audit quality</i>	Tidak
10	Nadirsyah et al. (2024)	<i>watchdog, fraud preventer, value adder</i>	<i>internal control, audit quality</i>	Implisit
11	Nguyen et al. (2024)	<i>assurance provider, fraud preventer</i>	<i>competence, independence, leadership support</i>	Tidak
12	Barra (2023)	<i>trusted advisor, value-adder, assurance provider</i>	<i>independence, organizational culture</i>	Tidak
13	Suprpto & Agustia (2023)	<i>watchdog, fraud preventer</i>	<i>internal control</i>	Tidak
14	Lonto et al. (2023)	<i>watchdog, fraud preventer, assurance provider</i>	<i>competence, independence, audit quality</i>	Tidak
15	Silalahi et al. (2023)	<i>compliance enforcer, fraud preventer</i>	<i>internal control</i>	Implisit
16	Volodina et al. (2023)	<i>watchdog, consultant, value adder</i>	<i>independence, organizational culture</i>	Tidak
17	Sutaryo et al. (2022)	<i>watchdog, value-adder, assurance provider</i>	<i>competence, internal control</i>	Tidak

Tabel 4 menunjukkan bahwa peran *watchdog* dan *assurance provider* lebih dominan, sementara peran *trusted advisor* dan *value-adder* masih berkembang (Barra, 2023; Calvin et al., 2026; Nadirsyah et al., 2024; Sutaryo et al., 2022; Volodina et al., 2023). Determinan kinerja didominasi oleh independensi dan kompetensi, dengan motivasi muncul pada beberapa artikel APIP Indonesia (Hwee & Nasution, 2024; Rihaney et al., 2024; Samagaio & Felício, 2023). Kaitan eksplisit dengan patriotisme tidak ditemukan pada satupun artikel. Namun, tiga artikel berikut memuat frase yang dekat dengan komitmen patriotik kepada negara, yaitu Rizki & Turner (2023) dengan frase "*protect the public resources belonging to all citizens*", Nadirsyah et al. (2024) dengan frase "*fostering trust among citizens*", dan Silalahi et al. (2023) yang menggunakan *stewardship theory* dengan asumsi pejabat lokal "*work with motivation and dedication*".

Sintesis literatur menjawab pertanyaan riset kedua (RQ2) melalui matriks pada Tabel 5 yang mengidentifikasi lima rumusan hubungan konseptual antara dimensi patriotisme keuangan dan dimensi peran auditor internal pemerintah, serta jalur manifestasinya.

Tabel 5. Matriks Sintesis Rumusan Hubungan Konseptual

No	Dimensi Patriotisme Keuangan	Dimensi Peran Auditor Internal Pemerintah	Jalur Manifestasi	Titik Temu	Kunci Penghubung Konseptual
1	Patriotisme keuangan otoritas publik sebagai aktor multilevel kebijakan fiskal	Aparatur pelaksana akuntabilitas keuangan negara	Dampak	Implisit	Hue et al. (2025)
2	Patriotisme sebagai dimensi inti <i>PSM</i>	Motivasi auditor sebagai determinan kualitas audit	Motivasi	Implisit	Hue et al. (2025)
3	Patriotisme keuangan sebagai pencegah ekonomi bayangan dan kebocoran fiskal	Auditor sebagai pencegah <i>fraud</i> dan pengaman keuangan negara	Dampak	Implisit	Hue et al. (2025)
4	Patriotisme keuangan sebagai prinsip <i>moral-civic alignment</i> kepentingan individu dan negara	Etika profesi dan integritas auditor sebagai determinan kualitas audit	Praktik	Implisit	Hue et al. (2025)
5	Patriotisme sebagai komitmen pengabdian non-ekonomi kepada negara	<i>Stewardship</i> auditor dan dedikasi melampaui insentif material	Motivasi	Implisit	Hue et al. (2025)

Temuan empirik Hue et al. (2025) mengidentifikasi empat faktor PSM aparatur publik di Vietnam. Keempat faktor yang diidentifikasi, khususnya *Activistic Patriotism* dan *Egoistic Patriotism*, mengandung beberapa lapisan nilai sekaligus, yaitu motivasi pelayanan publik, orientasi terhadap integritas dan tata kelola etis, sikap terhadap insentif finansial, serta pola penyelarasan kepentingan pribadi dan publik. Karena itu, studi Hue et al. (2025) dapat digunakan sebagai penghubung konseptual dari dimensi patriotisme keuangan ke dimensi peran auditor yang beragam, mulai dari akuntabilitas keuangan keuangan, pencegahan *fraud* hingga etika profesi sebagai dimensi makro dan *stewardship* aparatur, bukan hanya ke dimensi motivasi auditor.

Kelima rumusan hubungan konseptual pada Tabel 5 diklasifikasikan ke dalam tiga jalur manifestasi yang merefleksikan konteks pertemuan dimensi patriotisme keuangan dan dimensi peran auditor internal pemerintah. Jalur motivasi termanifestasi pada kualitas inheren internal auditor berupa motivasi pelayanan publik dan komitmen pengabdian non-ekonomi. Jalur praktik termanifestasi pada etika profesi dan integritas auditor sebagai determinan kualitas audit. Jalur dampak termanifestasi pada akuntabilitas keuangan negara dan pencegahan *fraud*. Dari hasil sintesis, didapati bahwa pelaksanaan peran auditor lebih banyak termanifestasi pada level motivasi dan dampak, sementara level praktik relatif kurang dieksplorasi dalam literatur empirik yang ditelaah.

PEMBAHASAN

Hasil sintesis literatur menunjukkan adanya empat tema yang menjelaskan implikasi temuan SLR terhadap perkembangan literatur patriotisme keuangan dan peran auditor internal pemerintah. Tema pertama adalah keragaman istilah yang digunakan untuk merujuk pada konsep yang berdekatan dengan patriotisme keuangan. Tabel 3 mengungkapkan empat istilah utama yang digunakan dalam literatur, yaitu *financial patriotism* (Krysovaty et al., 2025), *financial*

nationalism (Johnson & Barnes, 2025), *economic patriotism* Hoeffler (2023), serta *patriotism (general)* yang digunakan oleh lima studi empirik kepatuhan pajak. Keragaman tersebut mencerminkan tiga perspektif pemaknaan. Perspektif pertama melihat fenomena dari sisi negara dengan istilah *financial nationalism* dan *economic patriotism*. Perspektif kedua memodelkan patriotisme sebagai variabel afektif individu pada konteks kepatuhan pajak. Perspektif ketiga, dirumuskan oleh Krysovatty et al. (2025), menyatukan kedua pendekatan tersebut dalam konstruk multilevel yang mencakup otoritas publik, sektor bisnis, dan rumah tangga. Krysovatty et al. (2025) menyediakan kerangka induk yang komprehensif sehingga dapat dijadikan acuan rujukan utama dalam penelitian lanjutan.

Tema kedua adalah dominasi konteks UMKM dan wajib pajak orang pribadi pada literatur empirik patriotisme keuangan. Tabel 3 menunjukkan bahwa lima dari delapan studi kluster tematik Patriotisme Keuangan berkonteks UMKM atau wajib pajak orang pribadi (Alshira'h et al., 2021; Kristiana et al., 2025; Nastiti et al., 2025; Nurhayati et al., 2025; Sari et al., 2025). Sementara itu, hanya dua studi (Hoeffler, 2023; Krysovatty et al., 2025) yang memodelkan otoritas publik atau aparatur publik sebagai aktor patriotisme keuangan. Pola tersebut mengindikasikan bahwa patriotisme keuangan secara empirik telah mapan sebagai konstruk anteseden kepatuhan fiskal pada sisi pembayar pajak, namun belum mapan sebagai konstruk yang melekat pada aktor aparatur pengawas. Auditor internal pemerintah, sebagai bagian dari aparatur publik, secara fungsional dekat dengan operasionalisasi patriotisme keuangan otoritas publik (Krysovatty et al., 2025), namun belum pernah dimodelkan sebagai aktor patriotisme keuangan dalam literatur empirik.

Tema ketiga adalah artikulasi tiga jalur manifestasi patriotism keuangan dalam peran auditor internal pemerintah. Klasifikasi kelima rumusan hubungan konseptual pada Tabel 5 ke dalam jalur motivasi, jalur praktik, dan jalur dampak menunjukkan bahwa manifestasi patriotisme keuangan dalam peran auditor internal pemerintah dapat dipetakan secara berlapis. Jalur motivasi menempatkan patriotisme sebagai dimensi *Public Service Motivation* (Hue et al., 2025) yang berpotensi menjadi anteseden motivasi dan komitmen pengabdian auditor internal pemerintah. Jalur praktik mengusulkan bahwa motivasi patriotik berinteraksi dengan determinan struktural seperti independensi, kompetensi, dan etika profesi (Hwee & Nasution, 2024; Rihaney et al., 2024) dalam membentuk kualitas audit serta mendorong adopsi peran *trusted advisor* dan *value-adder*. Jalur dampak meletakkan pelaksanaan peran auditor sebagai kontributor pencegahan kebocoran fiskal dan pengamanan keuangan negara, sehingga peran auditor internal pemerintah dapat dimaknai sebagai manifestasi mikro patriotisme keuangan otoritas publik (Krysovatty et al., 2025; Sutaryo et al., 2022). Kerangka tiga jalur ini menjembatani literatur patriotisme keuangan multilevel dengan literatur peran auditor internal pemerintah melalui Hue et al. (2025) sebagai kunci penghubung konseptual yang membuktikan patriotisme sebagai dimensi inti motivasi pelayanan publik

Tema keempat adalah titik temu antara patriotisme keuangan dan peran auditor internal pemerintah. Tabel 5 menunjukkan bahwa pada lima rumusan hubungan konseptual hanya terdapat titik temu implisit dalam literatur. Tidak satupun rumusan hubungan konseptual memiliki titik temu eksplisit. Hal ini mengonfirmasi bahwa tidak ada artikel yang diperoleh dalam SLR yang menggunakan istilah patriotisme, khususnya patriotisme keuangan dalam konteks auditor internal pemerintah. Belum adanya titik temu eksplisit ini menjadi celah riset yang teridentifikasi dari hasil sintesis literatur.

Saran Penelitian Selanjutnya

Sintesis ini membuka sejumlah arah penelitian lanjutan. Pertama, pengujian empirik patriotisme keuangan pada auditor internal pemerintah perlu dilakukan untuk menguji proposisi pada Tabel 5, baik melalui pendekatan kuantitatif pada auditor APIP dan inspektorat maupun melalui pendekatan kualitatif yang menelusuri pemaknaan auditor. Kedua, pengembangan instrumen pengukuran patriotisme keuangan pada level individual aparatur diperlukan, dengan menurunkan dimensi dari kerangka motivasi pelayanan publik Hue et al. (2025) ke dalam butir yang spesifik untuk konteks audit. Ketiga, penelitian dapat menyusun model *behavioral auditing* sektor publik yang menempatkan patriotisme keuangan sebagai anteseden motivasi, independensi,

dan kualitas audit, sehingga jalur manifestasi yang dipetakan pada tinjauan ini dapat diuji secara utuh.

KESIMPULAN

Penelitian ini memetakan literatur terdahulu mengenai patriotisme keuangan dan peran auditor internal pemerintah. Dari identifikasi dimensi patriotisme keuangan dan dimensi peran auditor internal pemerintah dalam literatur dapat disimpulkan bahwa patriotisme keuangan dipetakan dalam tiga perspektif konseptual, yaitu nasionalisme keuangan *top-down* (Johnson & Barnes, 2025), patriotisme ekonomi tingkat kebijakan (Hoeffler, 2023), serta patriotisme keuangan multilevel yang inklusif (Krysovaty et al., 2025). Peran auditor internal pemerintah dipetakan dalam paradigma *watchdog* hingga *trusted advisor* dan *value-adder*, dengan determinan kinerja didominasi oleh independensi, kompetensi, dan motivasi. Dari sintesis antara dimensi patriotisme keuangan dan dimensi peran auditor internal pemerintah, diketahui bahwa terdapat lima rumusan hubungan konseptual yang didukung secara implisit dalam literatur, sebagaimana disintesis pada Tabel 5. Studi oleh Hue et al. (2025) memberikan kunci penghubung konseptual yang menjembatani patriotisme dengan motivasi pelayanan publik aparatur negara. Penelitian ini mengusulkan bahwa peran auditor internal pemerintah dapat dimaknai sebagai manifestasi mikro patriotisme keuangan otoritas publik melalui jalur motivasi, jalur praktik, dan jalur dampak. Kontribusi penelitian bersifat teoretis, yaitu menawarkan kerangka konseptual yang menjembatani patriotisme keuangan dan peran auditor internal pemerintah, dua bidang yang selama ini berkembang secara terpisah dalam literatur. Keterbatasan penelitian mencakup ukuran literatur yang terbatas pada 31 artikel periode 2021 - 2026, dominasi konteks Indonesia pada literatur auditor internal pemerintah, serta akses terbatas pada artikel non-Bahasa Inggris dan non-Bahasa Indonesia.

REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008).
- Alshira'h, A. F., Al-Shatnawi, H. M., Al-Okaily, M., Lutfi, A., & Alshirah, M. H. (2021). Do public governance and patriotism matter? Sales tax compliance among small and medium enterprises in developing countries: Jordanian evidence. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 431–455. <https://doi.org/10.1108/EMJB-01-2020-0004>
- Barra, K. De. (2023). Making internal audit count. *Administration*, 71(4), 25–44. <https://doi.org/10.2478/admin-2023-0024>
- Bitschnau, M., & Mußotter, M. (2024). (National) pride and (conceptual) prejudice: critical remarks on the distinction between patriotism and nationalism. *Journal of Political Ideologies*, 29(1), 64–78. <https://doi.org/10.1080/13569317.2022.2096301>
- BPK RI. (2026). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II / 2025*. <https://www.bpk.go.id/ihips>
- Calvin, C. G., Eulerich, M., & López Kasper, V. I. (2026). Evolving Role of Internal Audit: Characteristics and Benefits of Trusted Advisor Adoption. *Journal of International Accounting Research*, 1–26. <https://doi.org/10.2308/JIAR-2023-054>
- Fauzi, A., Lucyanda, J., Permana, F., Margaretha, T., & Novita, M. (2024). The Role of Auditor Independence, Professionalism, Skepticism, and Organizational Culture on Auditor Performance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 16(2), 168–186. <https://doi.org/10.15294/jda.v16i2.3703>
- Heider, F. (1983). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Lawrence Erlbaum Associates. <https://books.google.co.id/books?id=Zh6TDMayL0AC>
- Hoeffler, C. (2023). Arming Fortress Europe? Spaces and Instruments of Economic Patriotism in EU Armament Policy. *Politics and Governance*, 11(4). <https://doi.org/10.17645/pag.v11i4.7231>
- Huang, Z., Yang, Z., & Meng, T. (2023). National Identity of Locality: The State, Patriotism, and Nationalism in Cyber China. *Journal of Chinese Political Science*, 28(1), 51–83. <https://doi.org/10.1007/s11366-022-09820-4>

- Hue, T. H. H., Trang, N. T. Q., & Vu, T. T. (2025). Public service motivation in Vietnam: Insights from a Q-methodology approach. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 12(1), 68–85. <https://doi.org/10.18488/74.v12i1.4156>
- Hwee, T. S., & Nasution, S. A. (2024). Sustaining Government Internal Auditor Performance: A Mixed Method Study. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 7(1), 133–157. <https://doi.org/10.33005/jasf.v7i1.498>
- Johnson, J., & Barnes, A. (2025). Contemporary Financial Nationalism in Theory and Practice. *Nationalities Papers*, 53(2), 260–278. <https://doi.org/10.1017/nps.2024.46>
- Kitchenham, B. (2004). Procedures for Performing Systematic Reviews. *Keele, UK, Keele Univ.*, 33.
- Kristiana, D. R., Hatta, A. J., & Trisanti, T. (2025). Tax Morality And Patriotism Under Public Fiscal Reform: Evidence From Indonesian MSMEs. *Public and Municipal Finance*, 14(4), 26–37. [https://doi.org/10.21511/pmf.14\(4\).2025.03](https://doi.org/10.21511/pmf.14(4).2025.03)
- Krysovaty, A., Horyn, V., Lobodina, Z., Pohrishchuk, H., Dobizha, N., & Bulavynets, V. (2025). Financial Patriotism: Theoretical Substantiation And Role In Ensuring The Financial Security Of The State. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 1(60), 123–136. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.60.2025.4614>
- Liston-Heyes, C., & Juillet, L. (2024). Does increasing auditors' independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform. *Public Administration*, 102(3), 1045–1068. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/padm.12964>
- Lonto, M. P., Sukoharsono, E. G., Baridwan, Z., & Prihatiningtias, Y. W. (2023). The Effectiveness of Internal Audit for Fraud Prevention. *Australasian Business, Accounting and Finance Journal*, 17(3), 171–190. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v17i3.11>
- Lubis, H. Z., Sari, M., Ramadhany, A. A., Ovami, D. C., & Brutu, I. R. (2024). Effect of internal audit, internal control, and audit quality on fraud prevention: Evidence from the public sector in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 22(2), 40–50. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(2\).2024.04](https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.04)
- Mußotter, M. (2022). We do not measure what we aim to measure: Testing Three Measurement Models for Nationalism and Patriotism. *Quality & Quantity*, 56(4), 2177–2197. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01212-9>
- Mußotter, M. (2024). On nation, homeland, and democracy: Toward a novel three-factor measurement model for nationalism and patriotism. Evidence from two representative studies. *Political Psychology*, 45(6), 903–921. <https://doi.org/10.1111/pops.12945>
- Nadirsyah, Indriani, M., & Mulyany, R. (2024). Enhancing fraud prevention and internal control: the key role of internal audit in public sector governance. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2382389. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2382389>
- Nastiti, P. K. Y., Damayanti, T. W., Rita, M. R., & Supramono, S. (2025). Role of business sustainability, patriotism of business actors, and digital transformation in increasing MSME tax compliance. *Cogent Business & Management*, 12(1), 2459328. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2459328>
- Nguyen, T. Q., Truong, T. H., Tran, M. D., Phung, V. H., Nguyen, T. L., & Tran, B. M. (2024). Determinants influencing the effectiveness of internal auditing and the responsibility of auditors in fraud detection in an emerging country. *Journal of Governance and Regulation*, 13(1, special Issue), 310. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1siart5>
- Nurhayati, Maksum, A., Siregar, N. B., & Nasution, F. N. (2025). Determinant Factor of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: Integrates of TPB Theory and Social Identity Theory. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(11). <https://doi.org/10.3390/jrfm18110595>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

- Peraturan Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2021).
- Perry, J. (1996). Measuring Public Service Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 6. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024303>
- Perry, J. L., & Wise, L. R. (1990). The Motivational Bases of Public Service. *Public Administration Review*, 50, 367. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:154683768>
- Piwoni, E., & Mußotter, M. (2023). The evolution of the civic–ethnic distinction as a partial success story: Lessons for the nationalism–patriotism distinction. *Nations and Nationalism*, 29(3), 906–921. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/nana.12944>
- Rihaney, N., Deliana, D., & Napitupulu, I. H. (2024). The Influence of Competence, Independence and Motivation on Apip Audit Quality at the North Sumatera Provincial Inspectorate. *Kajian Akuntansi*, 25(1), 67–78. https://doi.org/10.29313/kajian_akuntansi.v25i1.3407
- Rizki, A., & Turner, M. (2023). How do public sector auditors perceive the concept and practice of auditor Independence? Evidence from Indonesia. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 45(2), 199–216. <https://doi.org/10.1080/23276665.2022.2110910>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behavior*. Pearson Education. <https://books.google.co.id/books?id=3f4uAAAAQBAJ>
- Safira, S. P., & Yuhertiana, I. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimoderasi Profesionalisme Account Representative. *Owner*, 7(3), 2284–2300. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1435>
- Samagaio, A., & Felício, T. (2023). The determinants of internal audit quality. *European Journal of Management and Business Economics*, 32(4), 417–435. <https://doi.org/10.1108/EJMBE-06-2022-0193>
- Sari, N. Z. M., Sondari, T., & Hadiana, R. N. (2025). Beyond compliance: How financial reporting practices shape tax behavior among growing MSME'S. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 274–285. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss2.art7>
- Silalahi, S., Hanif, R. A., Supriono, S., Hariyani, E., & Wiguna, M. (2023). Determinants Influencing Fraud Prevention in E-Procurement: Empirical Evidence from Indonesia. *Innovative Marketing*, 19, 199–206. [https://doi.org/10.21511/im.19\(4\).2023.16](https://doi.org/10.21511/im.19(4).2023.16)
- Suprpto, F. M., & Agustia, D. (2023). The Analysis of Fraudulent Financial Statements Prevention Using Hexagon's Fraud and Government Internal Auditor as Moderating Variable in Local Government in Indonesia. *Forum for Development Studies*, 50(3), 513–537. <https://doi.org/10.1080/08039410.2023.2232365>
- Sutaryo, Sahari, S., Jakpar, S., & Balia, S. (2022). Internal Audit Function and Public Service Quality: Evidence from Indonesian. *Public Administration Issues*, (5), 110–133. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-5-110-133>
- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The Role of Accountability in Determining the Relationship Between Financial Reporting Quality and the Performance of Public Organizations: Evidence from Vietnam. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(1). <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106801>
- Transparency International. (2026). *Skor CPI Indonesia 1995 - 2025*. <https://ti.or.id/Corruption-Perceptions-Index/>. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/>
- Usman, Fitrijanti, T., Soemantri, R., & Koeswayo, P. S. (2023). Internal auditor independence and audit quality: the influence of mediation role of professional ethics investigation (on the example of Gorontalo city inspectorate in Indonesia). *Economic Annals-XXI*, 206(11–12), 24–29. <https://doi.org/10.21003/ea.V206-04>
- Volodina, T., Grossi, G., & Vakulenko, V. (2023). The changing roles of internal auditors in the Ukrainian central government. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 19(6), 1–23. <https://doi.org/10.1108/JAOC-04-2021-0057>